



Dugaan Mark Up Pengadaan Lahan Tim Kejati Geledah Rektorat Undiksha

SINGARAJA, NusaBali

Tim Khusus Pemberantasan Korupsi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, amankan sejumlah dokumen terkait kasus dugaan mark up pengadaan lahan Kampus Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, di Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Rabu (22/4) petang. Dokumen itu ditemukan setelah tim yang beranggotakan tujuh orang mengeledah sejumlah ruangan di Gedung Rektorat Undiksha di Jalan Udayana, Singaraja.

Pengeledahan dilakukan hingga lima jam lebih, sejak pukul 11.00 Wita. Tim yang beranggota tujuh orang langsung menyebar ke sejumlah ruangan termasuk ruang Rektor yang berada di lantai 2. Selain itu, penyisiran juga dilakukan di ruang Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) yang berada di lantai 1. Sebagian lagi ada juga yang menyisir ruang Bagian Umum dan Perlengkapan yang berada di sisi timur bangunan utama Rektorat.

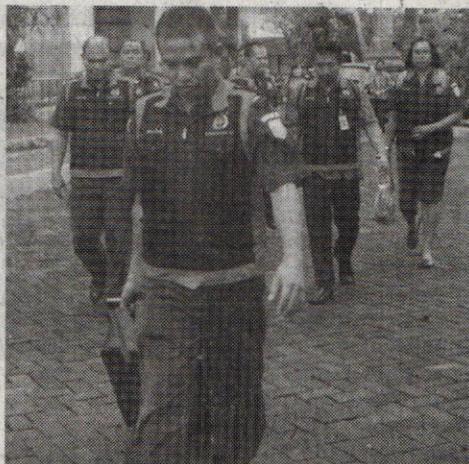
Tim khusus Kejati itu terlihat mondar-mandir dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Bahkan beberapa kali tim tersebut harus naik turun tangga dari lantai satu menuju lantai 2 dan ruangan lainnya. Penyisiran

baru rampung sekitar pukul 17.00 wita. Usai penyisiran, tim lantas mengambil tas warna hitam dari mobil untuk dibawa masuk ke ruang Rektor.

Sekitar pukul 17.45 Wita, tim beranggotakan tujuh orang itu baru keluar dari ruang Rektor dengan membawa sejumlah dokumen yang telah dimasukkan ke dalam tas warna hitam. Tas itu ditarik salah satu petugas untuk dimasukkan ke dalam mobil tim diparkiran.

Informasinya, penyitaan sejumlah dokumen itu terkait dengan kasus dugaan mark up itu telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Bahkan kabarnya, dalam kasus itu sudah ada dua calon tersangka yang disebutkan bernama I NM dan WS.

I NM adalah pejabat Pemkab Buleleng yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Konon ia memiliki peran penting



● NUSABALI/SUDIERTA

TIM khusus Kejati Bali sedang amankan dokumen yang sudah dimasukkan ke dalam tas warna hitam di Rektorat Undiksha, Rabu (22/4).

dalam pengadaan lahan Kampus Undiksha di Desa Jinengdalem. Konon, Mustiara memborong lahan cukup luas setelah mengetahui rencana pembangunan kampus di Jinengdalem. Bahkan, ia berani membeli lahan dua kali lipat dari harga normal. Semula harga NJOP lahan setempat hanya berkisar antara Rp2-3 juta, namun dibeli dengan harga hingga Rp 5-6 juta. Selanjutnya, tanah yang dibeli itu dijual kepada pihak panitia pengadaan lahan Undiksha dengan harga

Sementara tujuh anggota tim khusus Kejati yang dikonfirmasi ketika turun dari lantai satu dengan membawa sejumlah dokumen dalam tas warna hitam yang ditarik, tidak ada satupun yang memberikan keterangan. Salah satu tim hanya menyebut, mereka hanya mengamankan dokumen terkait dengan kasus Jinendalem. "Kita hanya amankan dokumen terkait," ujarnya sambil masuk ke dalam mobil.

hingga Rp 20 juta.

Sedangkan calon tersangka lagi, WS yang notabene adalah Ketua Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) Undiksha. Kabarnya juga, WS sempat mengajukan surat pengunduran diri pasca kasus dugaan markup itu mencuat. Namun hasil rapat Senat, pengunduran diri itu dimentahkan.

Terkait dengan penyitaan sejumlah dokumen dari gedung Rektorat, pihak Undiksha belum ada yang memberikan keterangan. Saat awak media hendak konfirmasi ke Rektor Undiksha Dr Nyoman Jampel di lantai 2, seorang petugas jaga meminta awak media menunggu di lantai 1. Hingga pukul 19.00 wita, Rektor Jampel yang ditunggu awak media di lantai 1 tidak juga kunjung keluar dari ruangan. **k19**

Edisi : Kamis 23 April 2015

Hal : 5



Penanganan Aset Bikin

Pengeng Eksekutif

★ Gubernur Pastika: Capek Juga Jaganya

Selain aset yang tercecer, Pastika juga berharap aset yang sudah ada bisa menghasilkan pendapatan bagi daerah.

DENPASAR, NusaBali

Masih banyaknya Aset Pemprov Bali yang tercecer membuat eksekutif *pengeng* pusing. Akibat penanganan aset yang begitu banyak tersebut, Gubernur Made Mangku Pastika pun minta back-up DPRD Bali. Dalam hearing gabungan terkait LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Pemprov Bali dengan Dewan Bali di Gedung DPRD Bali, Rabu (22/4) siang, Pastika meminta Dewan Bali mengeluarkan rekomendasi untuk penataan aset-aset Pemprov Bali, yang sekarang sedang

ditangani bersama Pansus Aset.

Dalam hearing kemarin dipimpin Ketua Pansus LKPJ DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa. Hadir Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama dan seluruh unsur pimpinan dewan. Sementara Pastika didampingi Kepala Bappeda Putu Astawa, Asisten II Bidang Perekonomian I Ketut Wija dan sejumlah pejabat Eselon II dan III.

Pastika mengatakan aset Pemprov Bali banyak tercecer dan sampai sekarang masih terus dicarikan solusi. "Aset kita banyak tercecer, 2 are, 3 are, 4 are. Seluruh Bali. Ini menelan biaya banyak untuk memasang papan nama. Banyak yang tercecer dan saya sudah mulai tata dengan menyertifikatkan atas nama Pemprov Bali. Mumpung ada Pansus Aset yang bekerja supaya secepatnya ada rekomendasi dari dewan. Supaya ada solusi, capek juga jaganya," ujar Pastika.

Gubernur Pastika menceritakan pengalamannya ketika tak sengaja keliling mengecek

program Pemprov Bali di Bedugul, Tabanan. Tiba-tiba ada plang ashram. Ketika ditelusuri ashram seluas 2,5 hektare itu tidak ada sertifikatnya. "Ashram ada, namun siapa pemilik tanah tidak tercatat. Akhirnya kami sertifikatkan atas nama Pemprov. Karena dulu itu aset Pemprov yang tidak terurus," tegas mantan Kapolda Bali ini.

Menurutnya, kalau tidak gelitik (rajin) untuk menata dan melakukan pengamanan, aset Pemprov Bali bakal banyak yang hilang. Kata Pastika, kasus tanah di Sumberkelampok itu salah satunya. Aset di Sumberkelampok yang dimohon masyarakat untuk digarap sampai saat ini belum bisa diselesaikan. Sebab harus ada persetujuan dewan, bukan atas keputusan gubernur. "Kalau per KK mintanya 2 hektare kami belum bisa berikan. Kalau dikasih semua habis itu. Pelepasan aset itu memerlukan persetujuan dewan. Bukan saya yang menyetujui. Kadang saya jadi sasaran tembak juga," kata Pastika.

Edisi : Kamis, 23 April 2015

Hal : 12



Sambungan

Selain aset yang tercecer, Gubernur Pastika juga berharap aset yang sudah ada bisa menghasilkan pendapatan bagi daerah. Seperti aset Pemprov Bali di Art Center Taman Budaya. Kata Pastika, Art Center rencananya akan diserahkan pengelolaannya kepada Perusahaan Daerah (Perusda). Pengelolaan ini untuk menghidupkan Taman Budaya melalui kegiatan seni dan budaya yang periodik.

Sementara anggota Komisi I DPRD Bali, I Wayan Gunawan yang juga Ketua Pansus Aset menegaskan bahwa banyak aset yang berpindah tangan, dan yang berhak mengelola secara melekak juga ada kesan tidak jelas. "Di daerah-daerah kasus ini banyak kita temukan. Misalnya saya contohkan, aset yang awalnya dikelola atas nama I Wayan Gunawan tiba-tiba pindah ke Mangku Pastika. Ini gimana pengawasannya," ujar Gunawan.

Sementara terkait dengan pengelolaan Art Center, mendapatkan persetujuan dewan. Ketua

Fraksi PDIP I Nyoman Parta mendukung langkah gubernur. "Saya setuju Art Center dikelola maksimal supaya dapat uang. Karena uang itu juga penting bagi biaya seni dan budaya. Biaya untuk seni dan budaya mahalnya luar biasa. Termasuk kesejahteraan seniman," ujar Parta.

Dia juga meminta Gubernur Pastika memperhatikan nasib seniman. Parta mengatakan ada seniman di Bukeleng I Wayan Jedur yang menggagas drama gonggong Sampek Engtay, sampai meninggal tidak pernah mendapatkan satu lembar pun penghargaan sebagai seniman. Padahal dedikasinya untuk seni dan budaya Bali luar biasa. "Jangankan uang, selembar kertas penghargaan saja nggak dapat dari pemerintah. Saya sedih dan mau nangis dengan sikap pemerintah yang tidak memperhatikan mereka. Seniman sakit *sing ade ane ngeruguang* (seniman sakit tidak ada yang menangani)," ujar mantan Sekretaris DPD PDIP Bali ini. **nat**

Edisi : Kamis, 23 April

Hal : 12